

## **ANALISIS MEKANISME KEUANGAN NEGARA INDONESIA DENGAN INGGRIS**

**Mochamad Ilhamudin<sup>1</sup>; Yermi Samuel iki<sup>2</sup>; Brilliant Syaifulloh<sup>3</sup>; Mohammad Rezandi Putranto<sup>4</sup>; Sekar langit<sup>5</sup>; Juang Abdi Muhammad, S.AP., M.AP<sup>6</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; Universitas Diponegoro

[1mochamadilhamudin@students.undip.ac.id](mailto:1mochamadilhamudin@students.undip.ac.id) ; [2yermisamuelyiki@students.undip.ac.id](mailto:2yermisamuelyiki@students.undip.ac.id) ;  
[3brilliantnyaifulloh@students.undip.ac.id](mailto:3brilliantnyaifulloh@students.undip.ac.id) [4muhammadrezandiputra@students.undip.ac.id](mailto:4muhammadrezandiputra@students.undip.ac.id) ;  
[5sekarlangit@students.undip.ac.id](mailto:5sekarlangit@students.undip.ac.id) ; [6juangabdimuhammad@lecturer.undip.ac.id](mailto:6juangabdimuhammad@lecturer.undip.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas perbandingan Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, dimana Presiden memegang kendali, tetapi sebagian besar kewenangannya didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Mekanisme anggaran di Indonesia telah mengalami perkembangan, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja. Metode penelitian menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dan bahan publikasi yang tersedia yang ada perpustakaan dan Internet. Fokus penelitian ini adalah membandingkan sistem keuangan yang ada di Indonesia dan Inggris, Dan mengkomparasikannya. Penelitian ini merekomendasikan Peningkatan informasi Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan, implementasi kebijakan, Penguatan Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran, Pengembangan Kerjasama Internasional dalam Keuangan negara.

**KATA KUNCI** : Pengelolaan keuangan negara, kebijakan moneter, Sistem keuangan, Bank Indonesia dan Bank of England.

---

## **ANALYSIS OF THE FINANCIAL MECHANISM OF THE INDONESIAN STATE WITH ENGLAND**

### **ABSTRACT**

This research discusses the comparison. In Indonesia, state financial management is regulated by the 1945 Constitution and Law no. 17 of 2003, where the President has control, but most of his authority is delegated to the Minister of Finance. The results of this research show that the budget mechanism in Indonesia has experienced development, including the implementation of performance-based budgeting. The research method uses a library research method. Literature study is a data collection technique carried out by searching for information from various sources, such as journals, books and published materials available in libraries and the Internet. The focus of this research is to compare the existing financial systems in Indonesia and England, and compare them. This research recommends improving information on state financial management in Indonesia, strengthening the supervision and management system, implementing policies, strengthening the role of Bank Indonesia in the payment system, developing international cooperation in state finances.

**Keywords** : State financial management, monetary policy, financial system, Bank Indonesia and Bank of England

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks ini, analisis mekanisme keuangan negara Indonesia memiliki relevansi yang signifikan dengan pengalaman negara-negara lain, termasuk Inggris. Kedua negara ini memiliki sistem keuangan yang berbeda, tetapi juga memiliki beberapa kesamaan dalam hal pengelolaan keuangan negara. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme keuangan negara di Indonesia dapat dipertimbangkan dalam konteks internasional, terutama dengan negara Inggris. Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, namun sebagian besar kewenangan tersebut didelegasikan kepada Menteri Keuangan dan Sekretaris Jenderal DPR RI. Sistem anggaran negara di Indonesia juga telah mengalami banyak perkembangan, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja dan anggaran terintegrasi. Sedangkan di Inggris, pengelolaan keuangan negara diatur oleh sistem dan eksekutif. Perdana Menteri dan Kabinet memegang kekuasaan eksekutif, sementara Parlemen memegang kekuasaan legislatif. Sistem anggaran di Inggris juga memiliki struktur yang kompleks, dengan anggaran yang disetujui oleh Parlemen dan dilaksanakan oleh eksekutif.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangannya. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi mencapai 5,2%

pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas pengeluaran publik dan memperkuat basis pendapatan negara. Dalam konteks ini, mekanisme keuangan negara Indonesia melibatkan berbagai elemen mulai dari pengumpulan pajak hingga alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, Inggris memiliki tradisi panjang dalam pengelolaan keuangan negara yang terstruktur dengan baik. Sistem anggaran Inggris ditujukan oleh Chancellor of the Exchequer yang bertanggung jawab atas penyusunan anggaran dan kebijakan fiskal. Proses ini melibatkan transparansi yang tinggi dan partisipasi publik dalam diskusi mengenai pajak dan belanja pemerintah. Dengan pendekatan ini, Inggris berhasil menjaga kestabilan ekonomi meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Perbandingan antara mekanisme keuangan Indonesia dan Inggris menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam struktur dan pelaksanaan kebijakan fiskal. Di Indonesia, meskipun ada kemajuan dalam hal transparansi anggaran, masih terdapat hambatan terkait akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik. Sementara itu, Inggris telah mengembangkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dan bahan publikasi yang tersedia yang ada perpustakaan dan Internet. Penelitian ini berfokus pada sistem keuangan dari dua negara yaitu Indonesia dan Inggris. Fokus penelitian ini adalah membandingkan sistem keuangan yang ada di Indonesia dan Inggris, Dan mengkomparasikannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1 Sistem Keuangan Negara Di Indonesia.

Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan (financial services) dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia (Peter S. Rose, 7<sup>th</sup> editionm 2000). Sistem keuangan memiliki fungsi-fungsi pokok, yaitu fungsi tabungan (saving function), fungsi kekayaan (wealth function), fungsi likuiditas (liquidity function), fungsi kredit (credit function), fungsi pembayaran (payment function), fungsi resiko (risk function), serta fungsi kebijakan (policy function). Dalam perjalanan sejarah sektor keuangan Indonesia, sistem keuangan mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi pada akhir dekade 1980-an yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan. sistem keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu

sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.

#### A. Sistem keuangan perbankan di Indonesia

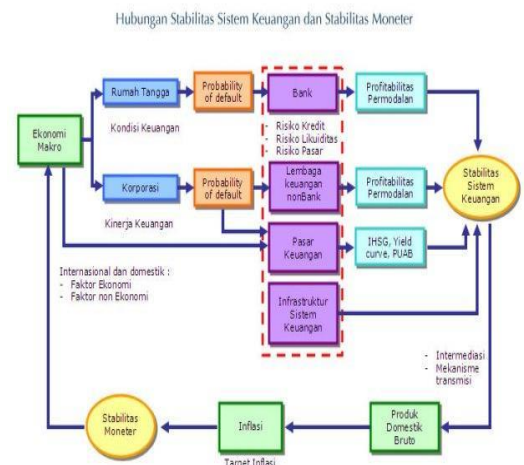
Sistem perbankan di Indonesia terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam kegiatannya, bank umum dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka, lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau menempatkannya dalam aktiva produktif lainnya. Berdasarkan Undang Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun jasa dalam lalu lintas sistem pembayaran dimaksud di antaranya adalah kliring, transfer/kiriman uang, *Letter of Credit* dan *Bank Guarantee*, jasa penitipan/penyimpanan, serta penerimaan setoran dan pembayaran (Manurung dan Rahardja, 2004). Sementara itu, BPR menurut perundangan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam kegiatannya, BPR juga tidak diperkenankan menerima simpanan giro serta tidak diperkenankan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas sistem pembayaran. Sistem keuangan lembaga keuangan bukan bank. Disamping lembaga depository, dalam sistem keuangan juga dikenal LKBB atau non bank financial institutions, yakni

lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya tidak menghimpun dana masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan. Berdasarkan perundangan, LKBB meliputi semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (non depository financial institutions). Di Indonesia LKBB terdiri dari (i) Lembaga pembiayaan yang terdiri dari perusahaan sewa guna usaha (leasing), modal ventura, dan anjak piutang (factoring); (ii) Pegadaian; (iii) Lembaga investasi yang terdiri dari perusahaan perantara dan pedagang sekuritas, bursa (exchange) dan bursa paralel (over the counter market) dan reksadana; serta (iv) Lembaga keuangan kontraktual yang terdiri dari perusahaan asuransi dan dana pensiun.

## B. Sistem keuangan lembaga keuangan bukan bank.

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak

dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.



Bank Indonesia memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi.

2. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik.

## 1.2 Sistem Keuangan Negara di Inggris.

Bank of England sering disingkat sebagai BOE adalah bank sentral Inggris yang berperan kunci dalam sistem keuangan negara Inggris. Bank sentral yang juga dikenal sebagai "*The Old Lady of Threadneedle Street*", didirikan pada tahun 1694 dan dianggap sebagai model dasar dari mayoritas bank sentral di seluruh dunia. BoE memiliki beberapa tugas dan wewenang penting, termasuk mengatur peredaran mata uang Pound Sterling (GBP), mengatur suku bunga, dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan ekonomi Inggris Raya.

Sebagai salah satu bank sentral tertua di dunia, BoE merupakan pemegang cadangan emas terbesar kedua di dunia setelah Federal Reserve Bank of New York. Ini membuat BoE menjadi salah satu pemain penting dalam pasar emas global. Selain itu, BoE juga memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas sistem keuangan global dengan bekerja sama dengan bank-

bank sentral lain di seluruh dunia. BoE juga merupakan anggota dari berbagai organisasi internasional seperti European Central Bank dan Bank for International Settlements. Dalam rangka menjalankan tugasnya, BoE dipimpin oleh Gubernur yang ditunjuk oleh Pemerintah Inggris. BoE juga memiliki beberapa divisi dan departemen, termasuk departemen kebijakan moneter, departemen stabilitas keuangan, dan departemen pasar keuangan.

### Fungsi Bank Sentral Inggris

Salah satu fungsi utama Bank Sentral Inggris adalah mencapai stabilitas moneter melalui kebijakan moneter, yang mendukung kebijakan nilai tukar dan kebijakan suku bunga yang terkait dengan pertukaran mata uang dalam perekonomian. Dalam menjalankan fungsinya, BoE memiliki tujuan operasional utama untuk mengurangi inflasi hingga 2 % atau kurang. Fungsi penting lainnya dari BoE adalah menyediakan fasilitas pembelian aset, atau yang juga dikenal sebagai Quantitative Easing (QE). Program QE diluncurkan oleh Bank of England pada tahun 2009 sebagai respons terhadap krisis keuangan global. Program ini diluncurkan oleh Bank of England pada tahun 2009 sebagai respons terhadap krisis keuangan global. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan jumlah uang yang diperdagangkan di pasar, yang akan meningkatkan likuiditas pasar mata uang dan menunda pertumbuhan ekonomi. Program ini adalah untuk meningkatkan jumlah uang yang diperdagangkan di pasar, yang akan meningkatkan likuiditas pasar mata uang dan menunda pertumbuhan ekonomi. BoE melakukannya dengan cara membeli aset-aset tertentu, seperti obligasi pemerintah atau sekuritas korporasi.



### **1.3 Perbandingan sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia dan Inggris dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia.**

Bank Indonesia atau (BI) tidak hanya memiliki tugas sebagai menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan merupakan satu ikatan yang saling bersangkutan dan tidak dapat dipisahkan, karena dalam sistem keuangan memiliki alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai pemeran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran utama itu mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas keuangan. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, dalam segi keamanan dan kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan

pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Pengembangan mekanisme pembayaran tersebut adalah dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Bank Indonesia juga memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis dan fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik.

Sedangkan di Inggris juga memiliki bank sentral yang berperan kunci dalam sistem keuangan negara Inggris. Bank sentral di Inggris sering disingkat BOE atau Bank of England atau juga yang dikenal sebagai "The Old Lady of Threadneedle Street". Salah satu fungsi utama Bank Sentral Inggris adalah mencapai stabilitas moneter melalui kebijakan moneter, yang mendukung kebijakan nilai tukar dan kebijakan suku bunga yang terkait dengan pertukaran mata uang dalam perekonomian. BoE memiliki tujuan operasional utama untuk mengurangi inflasi hingga 2 % atau kurang. BoE adalah menyediakan fasilitas pembelian aset, atau yang juga dikenal sebagai Quantitative Easing (QE). Program QE ini telah lama diluncurkan oleh Bank Sentral Inggris yakni sejak 2009 sebagai respons terhadap krisisnya keuangan global. Program ini bertujuan meningkatkan jumlah uang yang diperdagangkan di pasar, yang akan meningkatkan likuiditas pasar mata uang dan menunda pertumbuhan ekonomi dengan cara membeli aset-aset tertentu,

seperti obligasi pemerintah atau sekuritas korporasi. dari perbandingan kedua negara tersebut dapat disimpulkan Bank Indonesia (BI) memiliki tugas ganda menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, yang mencakup perbankan dan sistem pembayaran. Kedua aspek ini dianggap saling terkait, karena stabilitas sistem keuangan mempengaruhi transmisi kebijakan moneter. sedangkan Bank of England (BoE) juga memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas moneter, yang dicapai melalui kebijakan suku bunga, inflasi, dan stabilitas keuangan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan pertumbuhan ekonomi. Kedua bank sentral menggunakan instrumen yang berbeda untuk menjaga stabilitas keuangan, yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan kebijakan masing-masing negara.

## SIMPULAN

Meskipun kedua negara memiliki sistem keuangan yang berbeda, keduanya berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Di Indonesia, Bank Indonesia memiliki tugas utama menjaga keseimbangan moneter dan sistem keuangan, yang mencakup perbankan dan sistem pembayaran. keseimbangan ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan di Inggris, Bank of England berperan menjaga stabilitas moneter melalui kebijakan suku bunga dan inflasi, serta menjaga likuiditas pasar dengan program Quantitative Easing (QE). Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun metode yang digunakan berbeda, baik Indonesia maupun Inggris memiliki mekanisme keuangan yang dirancang untuk menyesuaikan dengan

kebutuhan dan tantangan ekonomi masing-masing negara tersebut.

## Rekomendasi

### 1. Peningkatan informasi Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia.

Indonesia perlu meningkatkan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara dengan lebih banyak melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan fiskal, seperti yang dilakukan Inggris. Sistem anggaran yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

### 2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Inggris dalam hal penguatan pengawasan atas pengeluaran pemerintah. Pengembangan sistem pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan setiap pengeluaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara efektif.

### 3. Implementasi Kebijakan.

Bank Indonesia perlu terus menjaga keseimbangan antara kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Penerapan kebijakan suku bunga yang tepat dan tidak terlalu ketat harus dipertimbangkan agar tidak mematikan kegiatan ekonomi,

sekaligus menjaga stabilitas keuangan dalam negara.

#### **4. Penguatan Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran.**

Bank Indonesia perlu memperkuat mekanisme sistem pembayaran yang lebih aman dan cepat, seperti sistem RTGS (Real Time Gross Settlement), untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam sistem pembayaran. Hal ini akan membantu menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

#### **5. Pengembangan Kerjasama Internasional dalam Keuangan negara.**

Mengingat Bank of England memiliki peran global dalam menjaga kestabilan keuangan internasional, Indonesia bisa memperkuat kerjasama dengan bank-bank sentral lainnya untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi tantangan global. Ini dapat membantu Indonesia dalam mengelola risiko global yang mempengaruhi keseimbangan ekonomi domestik.

## **REFERENSI**

Bank Indonesia. 2007. Booklet Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan.

[Bot Verification \(unida.ac.id\)](https://unida.ac.id)

Hendro Lisa, dan Sholeha 2028. PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI NEGARA MUSLIM MINORITAS (STUDI KASUS: INGGRIS). Jurnal Al-Muqayyad. Volume 01 No 99-111

Imelia santosa. 2023. *Inggris dan Kebijakan Ekonominya terhadap Dunia*. Di akses pada jumat 4, oktober, 2024 melalui link [Inggris dan Kebijakan Ekonominya terhadap Dunia | HSB Investasi](#)

Irvani, Ahmad. 2016. Inggris Sebagai Sentral Keuangan Islams di Barat, ASY-SYAR" IYYAH, Vol. 1 No. 1

Mallika Nurwin Fitria, 2022, *Mauliddina Kurnia Dewi, Industri Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris*. Jurnal Integrasi Keilmuan, Vol. 1, No. 51-60

Christian, N., Erica, E., Crystina, C., & Winna, W. (2024). Perbandingan Praktik Akuntansi Negara Indonesia dengan Negara Inggris. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 479-480